



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2411-2419

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Radikalisme Islam dan Deradikalisasi di Media Sosial Instagram

Khairul Fajri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: uncukhairulfajri@gmail.com

Abstrak

Terlepas dari fakta bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017, mereka terus menyebarkan ajaran mereka di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang masalah radikalisme Islam di media sosial Instagram dan untuk menemukan masalah deradikalisasi di platform tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik kualitatif teks dengan menganalisis gambar yang diposting di Instagram pada tahun 2022. Metode pengumpulan data menggunakan perangkat ponsel untuk menangkap layar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, radikalisme Islam dalam bentuk ujaran kebencian masih ada di media sosial. Kedua, pemerintah berusaha menghentikan penyebaran radikalisasi di media sosial dengan menanamkan sikap nasionalisme di kalangan pemuda, menekankan nilai-nilai moderasi beragama, dan memanfaatkan sektor pendidikan untuk melindungi generasi muda dari tindakan kekerasan terhadap agama Islam.

Kata Kunci: *Radikalisme, Derakalisasi, Media*

Abstract

Although the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) organization was officially disbanded by the government in 2017, its preaching is still being spread on various social media, one of which is Instagram. This study aims, first, to explain the issues of Islamic radicalism on Instagram social media. Second, to explain the issues of de-racialization on Instagram social media. This study uses a qualitative text method. The data in the study were obtained from analyzing images posted on Instagram in 2022. The data collection technique was by screenshotting with a mobile phone device. The results of this study found that first, Islamic radicalism in the form of hate speech is still carried out on social media. Second, the government is making efforts to overcome the spread of radicalism on social media by implementing a nationalistic attitude towards young people, the values of religious moderation and also through the education sector so that the younger generation is safe from acts of violence against Islam.

Keywords: *Radicalism, De-racialization, Media*

PENDAHULUAN

Agar pesan agama dapat tersampaikan dengan efektif, berbagai metode perlu diterapkan, termasuk penggunaan media, seperti media visual ataupun audio-visual (Zaini, 2013). Media sosial telah menjadi alat penting bagi masyarakat di seluruh dunia karena perkembangan media saat ini yang sangat pesat, yang mencakup berbagai aspek digital dan internet (Syamsuriah, 2019). Banyak data yang tersedia di media sosial disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, proses pengiriman pesan yang menghilangkan jarak antara pembuat dan pembeli. Kedua, pesan lebih mudah dibagikan (Dewi & Triandika, 2020). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwahnya.

Walaupun HTI dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017, dakwahnya terus menyebar melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram. Media sosial ini tidak hanya menyebarkan informasi mengenai kesalehan, tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan ideologi atau pandangan kelompok HTI kepada pengikutnya. Dakwah yang dilakukan oleh pengikut HTI memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan pesan-pesan sederhana yang dapat menarik perhatian, terutama bagi anak muda yang memiliki pengetahuan agama yang terbatas (Romario, 2019).

Siti Nur Fitriyana, dalam studinya yang berjudul "*Fenomena Eks-HTI Pasca Bubar,*" mengemukakan bahwa HTI mulai fluktuasi selama masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Walaupun demikian, tidak memiliki landasan hukum, HTI tetap melanjutkan penyebaran ideologinya mengenai khilafah. Untuk melakukannya, HTI memanfaatkan berbagai media, termasuk media sosial, karena jangkauan dakwah mereka sangat

terbatas. Dengan demikian, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dan mencapai tujuan mereka dalam mendirikan khilafah (Fitriyana, 2019).

Felix Tawaang dan Bambang Mudjiyanto, dalam penelitian mereka yang berjudul "Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial," menemukan bahwa keberhasilan dalam menangani paham radikal memerlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Pertama, keluarga sangat penting untuk mendidik anak. Kedua, tokoh agama sangat penting untuk mengajarkan agama kepada anak-anak, terutama kepada generasi muda yang mudah terpengaruh oleh media sosial terutama untuk generasi muda, yang rentan terhadap pengaruh media sosial (Tawaang & Mudjiyanto, 2021).

Setelah melihat penelitian sebelumnya, ternyata tidak ada kesamaan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian tambahan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca. Karena itu, penulis akan membahas radikalisme Islam dan upaya deradikalisasi di Instagram.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kepustakaan melibatkan analisis data dari sumber perpustakaan seperti artikel, buku, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan subjek penelitian (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-isu Radikalisme Islam dalam Insagram

Salah satu masalah yang disebarkan oleh radikalisme Islam melalui media sosial Instagram adalah berikut:

1. Moderasi Beragama

Dengan judul Agenda Global untuk Menjengkal Kebangkitan Islam Melalui Moderasi Beragama, dia menyatakan dalam postingan bahwa "Program moderasi beragama harus sesuai dengan kepentingan politik Amerika Serikat terhadap dunia Islam." Keterlibatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam Program Leadership International Visitor Program, atau IVLP, adalah contohnya. Setiap upaya Barat untuk melemahkan Islam telah didokumentasikan dalam sejarah. Program moderasi beragama tidak baru. Tapi itu ratusan tahun yang lalu. Saat orang-orang kafir Barat mengetahui bahwa ajaran Islam diterapkan dalam khilafah, sebuah lembaga negara

"Moderasi beragama pada dasarnya adalah proyek untuk menjauhkan Islam kaffah dari umat," kata sebuah postingan di akun lain dengan judul "Moderasi Beragama: Menjauhkan Islam Kaffah dari Umat." Sekularisme, pluralisme, westernisme, kontekstualisme, dan gender adalah lima komponen yang berbahaya dalam program tersebut. Semua komponen ini menghambat pelaksanaan syariat Islam serta menghambat eksistensi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (24 Januari 2022).

Berdasarkan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka sangat menentang moderasi beragama dalam Islam karena dianggap akan menghasilkan generasi yang moderat menurut Barat. Mereka percaya bahwa ini tidak sejalan dengan moderasi yang ada di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim di dunia. Mengingat bahwa moderasi merupakan ajaran utama dalam agama Islam, masalah ini menjadi fokus penting dalam percakapan tentang moderasi beragama (Fahri & Zainuri, 2019). Jika diterapkan di Indonesia, moderasi beragama sangat relevan, baik dalam hal agama, adat, suku, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Anti Pendidikan Sekularisme

Sebuah postingan yang berjudul "Hukum Sekuler Menyuburkan Pelecehan Terhadap Muslimah" menyatakan bahwa "dari sudut pandang sekularisme, agama hanya merupakan salah satu dari berbagai nilai atau norma yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang, bahkan agama sering kali tidak dijadikan acuan sama sekali." Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penistaan agama menjadi hal yang umum. Postingan dengan judul "Pendidikan Sekuler Bikin Pelajar "Teler" Bunuh Diri Jadi Solusi" menyatakan bahwa "umat harus segera menyadari bahaya sekularisme yang mendasari kehidupan modern." Sekularisme dapat menghalangi pelajar dari rasa kemanusiaan dan membuat mereka hedonis, bahkan terhadap Tuhan. Karena pengaruh liberalisme dan pendidikan tanpa agama, pendidikan sekuler telah membuat siswa "teler" dan lemas" (28 Juli 2022).

Simpulannya adalah bahwa pendidikan sekularisme harus dihapus dari Indonesia karena dapat membahayakan siswa dan generasi muda. Keyakinan sekuler dapat membedakan kehidupan dunia dan akhirat dari setiap aspek kehidupan seseorang. Hak untuk bebas dari aturan agama juga didukung oleh pendidikan sekularisme. Dengan kata lain, sekularisme adalah keyakinan bahwa aturan agama tidak mempengaruhi keputusan dan tindakan manusia (Jamaluddin, 2013).

3. Anti Kapitalisme dan Liberalisme

50 Persen Warga Alami Kelaparan Tersembunyi: Dampak dari Penerapan Kapitalisme" yang diposting oleh sebuah akun. Hal ini menunjukkan bahwa kekurangan gizi dan kelaparan memengaruhi hampir sepertiga populasi global. Ini merupakan dampak dari sistem ekonomi kapitalisme yang menyebabkan banyak orang jatuh dalam kemiskinan dan sulit memenuhi kebutuhan pangan mereka." Penerapan Islam kaffah adalah solusi global untuk masalah ini.

"Mentolerir kasus penghinaan terhadap Islam merupakan bukti nyata dari dampak liberalisme," kata posting lain dengan judul "Liberalisasi Mentolerir Penghinaan Terhadap Islam." Toleransi terhadap berbagai jenis kebebasan individu tanpa batas adalah ciri khas negara demokrasi liberal. Terlepas dari kurangnya peran negara dalam menjaga kehormatan Islam dan umat Islam, umat Islam tidak dapat menghadapi penghinaan. Negara juga gagal membangun masyarakat yang berkepribadian Islam.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah ini, dapat disimpulkan bahwa rakyat dapat dianiaya oleh liberalisme dan kapitalisme, serta bahwa Islam dapat dihina. Kedua sistem ini mempromosikan kebebasan, seperti kebebasan pers, pasar bebas, dan demokrasi. Semua kebebasan ini berakar pada liberalisme dan kapitalisme. Kebebasan sering memaksa perubahan budaya, agama, dan politik di seluruh dunia (Tolchah, 2008).

4. Menegakkan Negara Khilafah

Mereka sering muncul dalam postingan Instagram yang mendukung penerapan pemerintahan Islam, dengan banyak masalah yang mendukung pendirian negara khilafah. "Menegakkan khilafah adalah kewajiban, sebagaimana diperintahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat dengan perintah yang tegas," kata salah satu postingan, yang berjudul "Kamu Kudu Tau Hukum Menegakkan Khilafah." Makna teks hukum sejalan dengan makna kontekstual (7 Maret 2022).

Dalam posting lain yang berjudul "Pemuda Muslim Harus Memperjuangkan Islam Melalui Tegaknya Khilafah", disebutkan bahwa "Pemuda Muslim adalah kunci keberhasilan Barat dalam melawan Islam, namun juga merupakan kunci kemenangan bagi Islam itu sendiri." Para pemuda Muslim yang siap menjadi pejuang terdepan dalam upaya untuk mengembalikan kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah akan selalu menantikan kemuliaan.

Dengan mempertimbangkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang Muslim, terutama generasi muda, memiliki kewajiban untuk mempertahankan pemerintahan khilafah. Mereka percaya bahwa penerapan sistem pemerintahan Islam dapat menguntungkan rakyat. Mereka percaya bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada syariat Islam, dan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Adhayanto, 2011).

Isu-su Derakalisasi dalam Instagram

Dalam artikel ini, kami akan membahas solusi yang dapat diambil pemerintah melalui media sosial Instagram untuk menghentikan penyebaran radikalisme Islam di Indonesia:

1. Moderasi Beragama

Pertama, pemerintah merekomendasikan pemeliharaan dan pengembangan persaudaraan antarumat beragama sebagai cara untuk memerangi radikalisme Islam di Indonesia. Sebuah postingan di akun Instagram Gerbangmajapahit berjudul "Moderasi Beragama Merupakan Upaya yang Esensial untuk Menekan Radikalisme" menyatakan bahwa "Moderasi adalah upaya untuk mengarahkan pola pikir, sikap, dan perilaku keberagaman agar tetap seimbang dan tidak ekstrem. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi langkah penting untuk mengurangi radikalisme" (26 September 2022).

"Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Keberagaman ini telah menjadi simbol persatuan dan dipertahankan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika," kata posting lain, "Indahnya Toleransi Beragama." Akibatnya, kita harus memastikan bahwa keragaman ini tetap utuh dan harmonis (23 Maret 2022).

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah ini, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dapat membantu mengatasi berbagai masalah keagamaan. Muslim moderat juga dapat menyelesaikan konflik antar umat beragama, termasuk kelompok radikal (Fahri & Zainuri, 2019). Kebersamaan umat Muslim di Indonesia adalah komitmen kolektif seluruh warga negara. Empat pilar utama yang membentuk nilai-nilai kebersamaan ini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk memastikan keberhasilan implementasi nilai-nilai ini, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama (Abror Mhd., 2020).

2. Nasionalisme/Pancasila

Kedua, pemerintah meminta orang Indonesia untuk menghidupkan nasionalisme dan prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan nasionalisme

menggabungkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, dan musyawarah dan mencerminkan tauhid. Posting berjudul "Aktualisasi Pancasila sebagai Cara untuk Memerangi Radikalisme, Khususnya Nilai Ketuhanan" merupakan referensi untuk rekomendasi ini. "Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa dan negara, menawarkan pandangan moderat yang mengakomodasi berbagai ideologi radikal," kata posting tersebut. Untuk mencegah radikalisme, Pancasila menggabungkan nilai agama dan kearifan lokal (27 September 2022).

Postingan yang berjudul "Dari Pemuda untuk Bela Negara" menyatakan bahwa "kesadaran tentang bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, khususnya generasi milenial." Sebagai generasi penerus dan pembaharu bangsa, pemuda milenial harus ditanamkan nilai-nilai bela negara sejak kecil. Ini adalah upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang saat ini menghadapi berbagai ancaman yang dapat merusak negara. Postingan ini menjelaskan peran pemuda dalam bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI (10 Januari 2022).

Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam (Kamal, 2013). Perbedaan agama, suku, kebiasaan, budaya, bahasa, dan lainnya sangat umum di negara ini. Prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, dapat menyatukan perbedaan tersebut (Purwati, Suryadi, Hakam, & Rakhmat, 2022). Pancasila sangat penting karena mendukung pelaksanaan nilai-nilai ini (Sutoyo, Trisiana, & Supeni, 2020). Selain itu, adalah tanggung jawab para pemuda untuk terus memperbaiki karakter mereka dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila (Heryansyah, 2014).

3. Pendidikan/Sekolah

Ketiga, untuk menjamin masa depan damai bangsa dan negara, pemerintah mengatakan bahwa pendidikan tentang terorisme dan radikalisme Islam harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Berdasarkan postingan berjudul "Tangkal Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme pada Sektor Pendidikan", yang menyatakan bahwa "Pencegahan dan penanggulangan ancaman radikalisme melalui pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, sangat penting. Sekolah dan perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pusat untuk membangun karakter siswa dan mahasiswa agar menjadi individu yang saling menghargai" (21 September 2022).

Postingan lain, "Lingkungan Pendidikan Wajib Tangkal Penyebaran Radikalisme," menyatakan bahwa "kebijakan pemerintah mengenai nilai-nilai toleransi harus melalui

pendidikan multikultural dan multibudaya serta penerapan sekolah ramah anak." Selain itu, penting untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan media sosial, pergaulan yang salah, ketidakstabilan emosional siswa, dan latar belakang keluarga dan masyarakat.

Seperti yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi radikalisme Islam. Menyediakan materi pendidikan yang dapat meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai toleransi adalah salah satu caranya (Purwati et al., 2022). Perhatian terhadap anak-anak saat ini sangat penting karena mereka dapat melakukan hal-hal yang merugikan negara (Fathurrochman & Muslim, 2021). Akibatnya, penerapan nilai-nilai moderat dalam pendidikan sangat penting untuk menghentikan kekerasan terhadap agama Islam.

SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa dakwah yang mengandung ujaran kebencian terus menyebar melalui media sosial, terutama Instagram. Pemerintah berusaha menghentikan penyebaran paham radikal di media sosial dengan mendidik orang-orang, terutama generasi muda, agar mereka tidak terlibat dalam kekerasan terhadap agama Islam. Pendidikan agama, nilai-nilai moderat, dan sikap nasionalisme ditanamkan dalam upaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman). *Rusydiah*, 1(1), 137–148.
- Adhayanto, O. (2011). *Khilafah dalam sistem pemerintahan Islam*. 1(1), 80–98.
- Dewi, D. K., & Triandika, L. S. (2020). *Konstruksi Toleransi pada Akun Media Sosial Jaringan Gusdurian*. 19–39.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). *Moderasi Beragama di Indonesia*.
- Fathurrochman, I., & Muslim, A. (2021). Menangkal Radikalisme Dengan Penguatan Pendidikan Karakter Nasionalisme Melalui Amaliyah Aswaja di SD Islamiyah Magetan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 801–818. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1071>
- Fitriyana, S. N. (2019). *Fenomena Dakwah Eks-HTI Pasca di Bubarkan*. 4, 197–211.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>
- Heryansyah, D. (2014). Tanggung Jawab Pemuda Terhadap Masa Depan Pancasila.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(4), 607–631.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art5>

- Ismatillah, A. N. (2016). Gerakan Islam Konteks Lokal dan Global: Respon Pemikiran Sosial dan Ekonomi Aktifis Gerakan Islam di Indonesia. *El-Hikam*, 9(1), 43–62. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229127716.pdf>
- Istadiyantha. (2013). Pengaruh Pemikiran Ulama Timur Tengah Terhadap Gerakan Islam Politik di Yogyakarta dan Surakarta. *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah*, 6(1), 65–76.
- Jamaluddin. (2013). Sekularisme: Ajaran dan Pengaruhnya Dalam Dunia Pendidikan. *Mudarrisuna*, 3(2), 309–327.
- Jamil, A. (2013). ISLAM DAN KEBANGSAAN: Tori dan Praktik Gerakan Sosial Islam di Indonesia (Studi atas Front Umat Islam Kota Bandung). *Harmoni*, 12(1), 130–143. Retrieved from <http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/199>
- Purwati, P., Suryadi, A., Hakam, K. A., & Rakhmat, C. (2022). Peran Pendidikan dalam Menangkal Penyebab Radikalisme dan Ciri Radikalisme. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7806–7814. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3595>
- Romario. (2019). *Hizbut Tahrir Indonesia dalam Ruang Media Sosial Instagram*. 4, 20–39.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. 6(1), 41–53.
- Setiadi, A. (2003). *Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi*. (1).
- Situmorang, J. R. (2013). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik , Bisnis , Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 77–91.
- Sutoyo, Trisiana, A., & Supeni, S. (2020). *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*.
- Syamsuriah. (2019). Tantangan Dakwah di Era Milenia. *Pendidikan*, 16(2), 164–174.
- Syifa A. Widigdo, M. (2018). Gerakan Islam Indonesia: Mengurai Belenggu, Membangun Peradaban. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jiwp.2222>
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunkasi Massa*, 2(2), 131–144.
- Tolchah, M. (2008). *Pendidikan dan Faham Liberalisme*. 3, 163–178.
- Wahyudin, D. (2017). Pendidikan Aswaja Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 17(02), 1–23.
- Zaini, A. (2013). *Dakwah Melalui Internet*. 93–108.